



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2019**

DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dapat tersusun, sebagai bahan pertanggungjawaban akuntabilitas pencapaian *outcome*, program, kegiatan dan anggaran Tahun 2019 sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *outcome* maupun *ouput* yang berkelanjutan.

LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target kinerja yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 beserta analisisnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 ini akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta

Darjamuni
NIP 196009291987031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.2.1. Kedudukan	2
1.2.2. Tugas	2
1.2.3. Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Sistematika Penyajian	7
II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	10
2.1. Visi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022	10
2.2. Misi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022	10
2.3. Urusan	11
2.4. Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta	13
2.4.1. Visi	14
2.4.2. Misi	14
2.4.3. Tujuan	14
2.4.4. Sasaran	14
2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019	18
2.6. Penetapan Kinerja Tahun 2019	19
2.7. Rencana Anggaran Tahun 2019	20
2.8. Instrumen Pendukung	21
III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019	23
3.1. Capaian Kinerja	23
3.2. Analisis Capaian Kinerja :	24
3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 1 (Persentase Ketersediaan Pangan)	24
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 2 (Pola Pangan Harapan)	27

3.3.	Realisasi Anggaran	33
IV	Penutup	36
4.1.	Kesimpulan	36
4.2.	Rencana Tindak Lanjut	36
Lampiran:		
1.	Capaian IKU RPJMD 2019	
2.	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
2.1	Program Urusan Pangan	12
2.2	Program Urusan Pertanian	12
2.3	Program Urusan Kelautan dan Perikanan	12
2.4	Program Bersama Penunjang Organisasi	12
2.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 2017-2022	15
2.6	Indikator Kinerja Utama 2019	19
2.7	Penetapan Kinerja Tahun 2019	19
2.8	Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	20
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
3.2	Capaian Kinerja Tahun 2019	24
3.3	Rincian indikator kinerja tentang ketersediaan	25
3.4	Target Kebutuhan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	25
3.5	Perkembangan skor PPH DKI Jakarta Tahun 2013-2018	27
3.6	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018	27
3.7	Penghitngan PPH DKI Jakarta Tahun 2018	29
3.8	Realisasi anggaran belanja langsung per program	30

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mengemban 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yaitu :

- 1) Persentase ketersediaan pangan
- 2) Skor Pola Pangan Harapan

Dari 2 Indikator tersebut, semua sudah mencapai target. Rincian pencapaian IKU Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Persentase ketersediaan pangan, dengan capaian kinerja 100% (sangat baik)
2. Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019, dengan capaian kinerja 88,3 (sangat baik)

Sampai dengan 31 Desember 2019, realisasi anggaran total APBD Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 mencapai Rp. 664.714.774.359,- (90,64%) dari anggaran Rp. 733.378.640.602,- penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 199.170.733.374,- (95,36%) dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 208.867.960.000,- dan penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 465.544.040.985,- (88,76%) dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 524.510.680.602,-

Memperhatikan capaian dan permasalahan yang dihadapi, dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di DKI Jakarta diarahkan pada berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kapasitas ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup. Pembangunan sektor ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan sistem perekonomian DKI Jakarta.

Terdapat berbagai tantangan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta terutama karena berkedudukan di ibukota negara, tantangan ke depan adalah mengendalikan ketersediaan bahan pangan baik produksi pertanian dan hortikultura, peternakan, maupun kelautan dan perikanan, berupa produk dasar maupun produk olahan. Selain ketersediaan pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan mutu dan keamanan pangan yang beredar dalam Kota Jakarta.

Dalam urusan lingkungan hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai tantangan berupa pelestarian sumber daya kelautan secara berkesinambungan.

Sedangkan peluang di sektor kelautan dan perikanan dimana luas laut 6.997,5 km² jauh lebih luas dibandingkan dengan luas daratan 661,52 km² perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas pembangunan Jakarta. Potensi kelautan dan perikanan yang ada sekarang perlu ditransformasi dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Tantangan dan peluang di atas tentu harus direspon dengan baik dengan mengimplementasikan berbagai macam strategi, program dan kegiatan.

Pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan secara sinergis harus dilakukan. Kondisi ini dapat diciptakan antara lain melalui pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan dengan penataan kelembagaan, perbaikan mekanisme kerja organisasi, penataan sumber daya aparatur, dan peningkatan kompetensi aparatur dengan pelimpahan tugas dan wewenang yang lebih spesifik. Penataan kelembagaan telah dilakukan pada awal Januari 2017 ini yaitu dengan restrukturisasi organisasi pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1.2.1. Kedudukan

Pelaksanaan tugas organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan.

1.2.2. Tugas

Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.

1.2.3. Fungsi

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta meliputi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DKPKP;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DKPKP;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pembangunan pengembangan dan pembinaan kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pengendalian kesehatan hewan, ikan dan tanaman;
- f. perlindungan sumber daya kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pengembangan teknologi kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- h. perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan pangan asal hewan, ikan dan tanaman;
- i. pemantauan dan pengendalian distribusi, ketersediaan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam rangka ketahanan pangan;
- j. pengelolaan sistem informasi rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. fasilitasi pemasaran hasil rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pembinaan tenaga fungsional rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- m. fasilitasi pengembangan kerjasama antar komunitas usaha ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- n. penyelenggaraan standarisasi di bidang kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- o. konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil;

- p. pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- q. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- r. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- s. pengawasan dan pengendalian izin di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- t. pelaksanaan pengawasan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- u. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- v. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang DKPKP;
- w. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DKPKP;
- x. pengelolaan kearsipan, data dan informasi DKPKP; dan
- y. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, susunan lengkapnya sebagai berikut:

A. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 4. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Kelautan, terdiri dari :
1. Seksi Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil;
 2. Seksi Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- e. Bidang Perikanan, terdiri dari :
1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- e. Bidang Pertanian, terdiri dari :
1. Seksi Pertanian Perkotaan;
 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian; dan
 3. Seksi Pengendalian Mutu dan Agribisnis.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
1. Seksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan

B. Suku Dinas lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Susunan Organisasi Suku Dinas Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari:

1. Kepala Suku Dinas;
 2. Subbagian Tata Usaha ;
 3. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 4. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Seksi Perikanan;
 6. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- b. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari:
1. Kepala Suku Dinas;
 2. Subbagian Tata Usaha ;
 3. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 4. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Seksi Kelautan dan Perikanan;
 6. Subkelompok Jabatan Fungsional
- c. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha.
 2. Seksi Pertanian.
 3. Seksi Kehutanan.
 4. Seksi Ketahanan Pangan.
 5. Sub Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Seksi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Susunan Organisasi UPT Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.
 1. Kepala Pusat
 2. Sub Bagian Tata Usaha.

3. Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman
 4. Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman.
 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- b. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.
1. Kepala Pusat
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian
 4. Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil Pertanian.
 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.
1. Kepala Unit
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan
 4. Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan.
 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- d. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.
1. Kepala Pusat
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran
 4. Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.
 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- e. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
1. Kepala Pusat
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Subbagian Keuangan
 4. Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan
 5. Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner
 6. Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan
 7. Satuan Pelaksana rumah Potong Hewan
 8. Satuan Pengawas Internal
 9. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- f. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
 - 1. Kepala Pusat
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3. Satuan Pelaksana Budidaya Laut
 - 4. Satuan Pelaksana Konservasi Laut.
 - 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2019. Capaian kinerja Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, serta struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2019 meliputi RPJMD 2017-2022, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2017-2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menjelaskan capaian kinerja organisasi selama tahun 2019 beserta analisisnya dan realisasi anggaran Tahun 2019.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Mekanisme penyusunan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian melalui metode pengumpulan data dari tiap UKPD, pengukuran kinerja dari data yang dikirimkan, verifikasi capaian kinerja dari tiap data indikator kinerja utama yang sesuai dengan sasaran strategis organisasi untuk memperoleh keandalan informasi, serta penelaahan analisis tiap-tiap sasaran strategis yang ditampilkan dalam laporan kinerja ini oleh pejabat pada masing-masing sektor yang terkait. Sedangkan penanggungjawab pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Dinas berada pada Sekretaris Dinas, khususnya di Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran. Adapun SOP tentang penyusunan laporan kinerja tersebut disajikan pada Lampiran 3.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- 1) RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022;
- 2) Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022;
- 3) Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Tahun 2019.

2.1. Visi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Pembangunan DKI Jakarta 2017–2022 adalah: ” **Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua** ”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
2. Kota yang dapat menjamin kehidupan yang maju, lestari dan berbudaya.
3. Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.
4. Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka mewujudkan keberadaban, keadilan dan sejahtera bagi semua.

2.2. Misi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan DKI Jakarta 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

2.3. Urusan

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada selama tahun 2018 merujuk pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Undang Undang tersebut Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan :

1. Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar, yaitu :
 Urusan Pangan
2. Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu :
 Urusan Pertanian
 Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan pengelompokan urusan tersebut, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

1. Urusan Pangan

Tabel 2.1 Program Urusan Pangan

No.	Program	Penanggungjawab
P1-1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketahanan Pangan

2. Urusan Pertanian

Tabel 2.2 Program Urusan Pertanian

No.	Program	Penanggungjawab
P2-1.	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

3. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.3 Program Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Program	Penanggungjawab
P3-1.	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Kelautan, Perikanan
P3-2.	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Kelautan

4. Program Bersama Penunjang Organisasi

Tabel 2.4 Program Bersama Penunjang Organisasi

No.	Program	Penanggungjawab
P4-1.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan	Sekretariat
P4-2.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan	Sekretariat
P4-3.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian	Sekretariat
P4-4.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian	Sekretariat
P4-5.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kelautan dan Perikanan	Sekretariat

No.	Program	Penanggungjawab
P4-6.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kelautan dan Perikanan	Sekretariat

2.4. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022

2.4.1. Visi

Dalam pembangunan ketahanan pangan, Kelautan dan Pertanian, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumber daya (dalam arti luas) tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, visi pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah:

”TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAN LAUT BIRU YANG BERKELANJUTAN MENUJU JAKARTA MAJU, LESTARI DAN BERBUDAYA UNTUK KEBERADAPAN, Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua”

Visi tersebut mengandung tiga unsur yang mewakili tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, yaitu: (1) Jakarta dengan sistem ketahanan pangan yang baik, (2) Jakarta dengan laut biru dan pemanfaatannya yang lestari.

Jakarta dengan ketahanan pangan yang baik berarti Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menargetkan terciptanya ketahanan dan keamanan pangan dalam hal ketersediaan, mutu, distribusi, dan akses oleh semua penduduk Jakarta sehingga penduduk Jakarta menjadi sejahtera secara pangan. Bidang-bidang yang berperan dalam pencapaian ini adalah Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Bidang Perikanan.

Jakarta Laut Biru berarti Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta akan terus menjaga dan meningkatkan perbaikan ekosistem laut yang berkelanjutan di Teluk Jakarta beserta pulau-pulau kecil dan pantai pesisirnya. Bidang-bidang yang terkait dengan visi ini adalah Bidang Kelautan dan Bidang Perikanan.

2.4.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menetapkan 9 (sembilan) misi Tahun 2017-2022, yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan, dan daya saing usaha pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

2.4.3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan, distribusi , konsumsi dan keamanan/kualitas pangan
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil perikanan
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi produk hewan dan kesehatan hewan
5. Mengembangkan potensi dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

2.4.4. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan terkendali dan terarah, maka sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketahanan pangan
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas produksi hasil pertanian
3. Meningkatnya jumlah dan kualitas produksi hasil perikanan
4. Meningkatnya jumlah dan kualitas produksi produk hewan dan kesehatan hewan
5. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
6. Terwujudnya kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

Tujuan dan sasaran tersebut di atas dirumuskan dan tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI
Jakarta 2017 - 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja per Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan	Terwujudnya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan	Beras 100%, daging 100%, Ikan 100%, Daging ayam 100%, telur dan susu 100%, sayur mayur 100%, buah buahan 100%	Beras 100%, daging 100%, Ikan 100%, Daging ayam 100%, telur dan susu 100%, sayur mayur 100%, buah buahan 100%	Beras 100%, daging 100%, Ikan 100%, Daging ayam 100%, telur dan susu 100%, sayur mayur 100%, buah buahan 100%	Beras 100%, daging 100%, Ikan 100%, Daging ayam 100%, telur dan susu 100%, sayur mayur 100%, buah buahan 100%	Beras 100%, daging 100%, Ikan 100%, Daging ayam 100%, telur dan susu 100%, sayur mayur 100%, buah buahan 100%
			Persentase Pangan yang aman dari bahan berbahaya	95 %	95 %	95 %	96 %	96 %
			Skor Pola Pangan Harapan	81	82	83	84	85

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja per Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian	Jumlah produksi benih padi		45,6	47,2	47,2	48
			Jumlah produksi tanaman produktif		36.700	36.700	37.000	37.000
			Jumlah produksi tanaman pertanian dan hortikultura		33.063	38.022	43.725	50.284
			Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian		109,4	114,68	120,04	125,27
			Jumlah lokasi agrowisata yang dikembangkan		8	10	12	14
			Jumlah kasus pelanggaran bidang pertanian		6	4	2	0
			Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	83				
			Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang berhasil direhabilitasi	141				
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian, peternakan dan keswan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian, peternakan dan keswan	Jumlah produksi pertanian dan peternakan	69.229				
			Jumlah kasus penyakit menulat strategis	12				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja per Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
			Jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan	10				
			Jumlah omzet pemasaran bunga dan tanaman hias		102.000.000.000	107.000.000.000	112.000.000.000	116.000.000.000
			Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4
			Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	4	4	4	4
3.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi produk hewan dan kesehatan hewan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian, peternakan dan keswan	Jumlah produksi susu		5.196.379	5.300.306	5.406.312	5.514.439
			Jumlah produksi daging		31.847.633	34.440.014	35.112.014	36.867.614
			Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan		11.000	12.000	13.000	14.000
			Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan Anthax)		11	10	9	8
			Jumlah pelayanan kesehatan hewan		9.000	9.500	10.000	21.000
4.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil perikanan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian	Jumlah produksi perikanan	703,786				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja per Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
			Jumlah produksi perikanan budidaya		4.412	4.434	4.456	4.478
			Jumlah produksi perikanan tangkap		150.552	152.430	153.701	155.386
			Jumlah produksi ikan hias		20.777. 303	21.335. 576	21.832. 231	22.324. 673
			Jumlah produksi benih ikan		79.594. 751	84.998. 143	90.810. 158	99.258. 335
			Jumlah produksi dan pemasaran olahan hasil perikanan		5.959	6.379	6.827,6	7.310
			Angka konsumsi ikan		37	38,5	40	41,5
			Indek kepuasan pelayanan kendaraan operasional		4	4	4	4
5.	Mengembangkan potensi dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan		78	73	68	65
			Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang berhasil direhabilitasi		141,9	142,4	142,9	143,4

2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 disajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Indikator Kinerja Utama 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan 1. Persentase Ketersediaan Pangan 2. Skor Pola Pangan Harapan

2.6. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta telah membuat penetapan kinerja Tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 2017- 2022 serta RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat SKPD yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam renstra tahun 2017-2022.

Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Penetapan Kinerja Tahun 2019

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya ketahanan Pangan	1 Indeks Ketahanan Pangan (ketersediaan)	100 %
	2 Indeks Ketahanan Pangan (skor pola pangan harapan)	82

2.7 Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp 753.249.910.386,-

Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp 733.378.640.602,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 208.867.960.000,- dan Belanja Langsung Rp 524.510.680.602,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 664.714.774.359,- (90,64%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 199.170.733.374,- (95,36%) belanja langsung sebesar Rp 465.544.040.985,- (88,76%)

2.7.1 Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

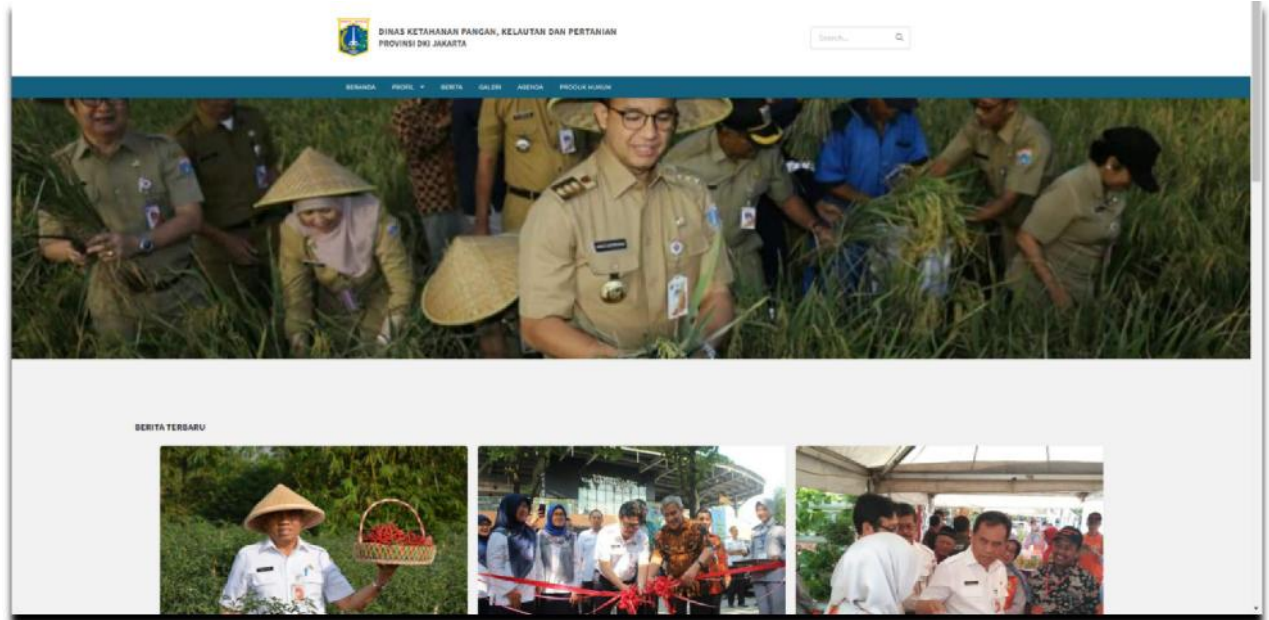
Target belanja dan prosentase belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	208.867.960.000,-	28,48 %
Belanja Langsung	524.510.680.602,-	71,52 %
Jumlah	733.378.640.602,-	100 %

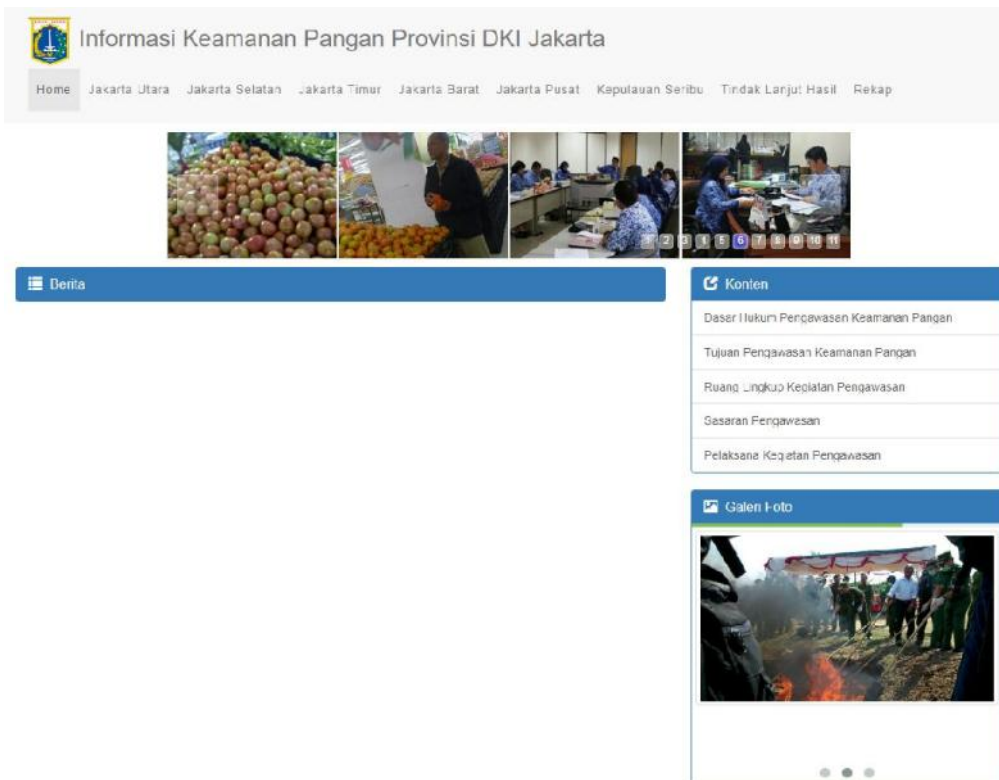
2.8 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung berupa situs yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan alamat <http://dkpkp.jakarta.go.id>

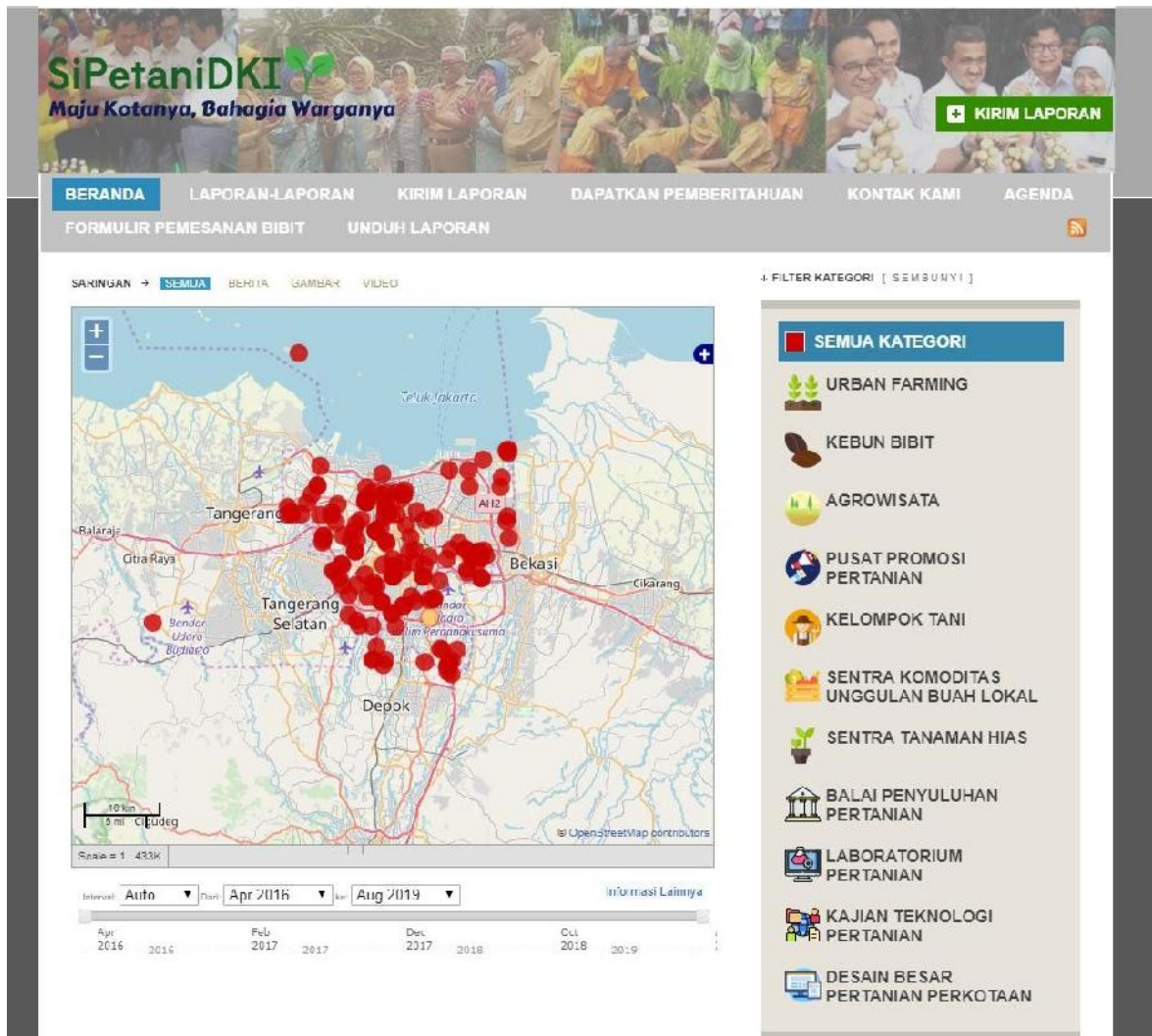


sedangkan aplikasi yang dikelola oleh Aplikasi :

1. Ketahanan Pangan Jakarta : <https://ketahananpangandki.com/>



2. Sistem Informas Petani DKI Jakarta :
<https://balkotfarm.jakarta.go.id/sipetanidki/>



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2019

3.1. Capaian Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel. 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 100	Sangat Baik
2.	76 90	Tinggi
3.	66 75	Sedang
4.	51 65	Rendah
5.	50	Sangat Rendah

Sumber : *Permendagri Nomor 54 Tahun 2010*

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 untuk setiap penetapan kinerja sasaran program tahun 2019 dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2019

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya ketersediaan pangan	1 Persentase ketersediaan pangan	100%	100%	100
	2 skor pola pangan harapan	82	88,3	100

Dari tabel di atas semua indikator kinerja dapat dicapai sesuai target dengan realisasi kinerja sangat baik.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 1 (Persentase Ketersediaan Pangan)

Sasaran program Terwujudnya Ketersediaan Pangan dilaksanakan pada program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, indikator kinerja persentase ketersediaan pangan. Target pada Tahun 2019 ditetapkan persentase ketersediaan pangan 100 %, realiasi program 100 %, sehingga capaian kinerja program 100 % (sangat baik).

Indikator ketersediaan pangan yang dituangkan dalam RPJMD hanya dibatasi pada pangan strategis, yaitu pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat dan sangat mempengaruhi inflasi daerah. Tabel 2 memberikan gambaran kebutuhan pangan dari setiap kategori atau jenis pangan. Namun demikian dalam RPJMD tahun 2018-2022, ketersediaan pangan yang dijadikan target hanya pangan strategis yang meliputi beras, daging, ikan, ayam, telur, susu, sayuran dan buah-buahan. Rincian indikator kinerja tentang ketersediaan pangan seperti tercantum pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Rincian indikator kinerja tentang ketersediaan pangan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD		Target capaian setiap tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaa n pangan	Beras	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Daging sapi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Daging ayam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Telur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Susu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sayur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Buah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Target setiap tahun 100 % menggambarkan bahwa pangan yang tersedia melebihi dari kebutuhan pangan penduduk DKI Jakarta. Hal ini untuk menjamin bahwa setiap penduduk DKI Jakarta dapat mengakses pangan baik dari segi fisik maupun ekonomi. Akses secara fisik artinya pangan tersedia dan terjangkau secara fisik oleh masyarakat, sementara akses secara ekonomi menggambarkan pangan tersedia secara visi dan dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan pangan tahun 2019, ketersediaan pangan sebagaimana yang ditargetkan pada RPJMD telah tercapai. Hasil secara lengkap sebagaimana tercantum pada tabel 3.

Tabel 3.4.Target Kebutuhan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

No	Komoditas	Target Pangan (Kg/Kp/Th)	Realisasi Kebutuhan Pangan (Kg/Kp/Th)	Ketersediaan (Kg/Kp/Th)	%
1	Beras	88.6	94.9	220.31	232.1
2	Daging Ruminansia	11.4	7.7	18.51	240.4
3	Daging Unggas	19.5	11.35	32.85	289.4
4	Telur	6.6	8.98	21.39	238.2
5	Susu	13.5	6.35	30.47	479.8
6	Ikan	14.5	24.05	26.46	110.0
7	Gula	8.2	5.4	31.58	584.8
8	Sayur	47.5	55.01	71.51	130.0
9	Buah	37.6	37.85	49.21	130.0

Berdasarkan Tabel di atas, maka ketersediaan pangan strategis telah mencapai lebih dari 100 % dibandingkan dengan kebutuhan pangan penduduk DKI Jakarta. Data ini menggambarkan bahwa meskipun produksi pangan di DKI Jakarta sangat minim untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk DKI Jakarta, namun dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta para stakeholdernya, maka kebutuhan pangan dapat terpenuhi lebih dari 100%. Dengan demikian upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar terus ditingkatkan sehingga pasokan pangan tetap terjaga, harga stabil dan dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk diantaranya meliputi:

1. Peningkatan produksi pangan di DKI Jakarta baik produk pertanian, peternakan maupun perikanan.
Peningkatan produksi pertanian dilakukan dengan program Urban Farming atau pertanian perkotaan, peningkatan produksi peternakan dengan meningkatkan produksi susu dan peningkatan produksi perikanan dengan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.
2. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah yang mengurus pangan
BUMD yang terlibat pada urusan pangan meliputi PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Ketiga BUMD inilah yang aktif melakukan usaha baik *trading* (perdagangan), kerja sama penyediaan pangan maupun mendukung program-program ketahanan pangan.
3. Kerja sama penyediaan pangan
Kerja sama penyediaan pangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah mitra dalam bentuk MoU. Adapun proses bisnisnya ditindaklanjuti oleh BUMD
4. Kebijakan Pemerintah Pusat
Kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga pasokan dan ketersediaan pangan diantaranya dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Program ini dikolaborasikan dengan Pemerintah Provinsi termasuk BUMD. Diantara kebijakan pemerintah pusat yang terkait langsung dengan ketersediaan pangan di DKI Jakarta adalah kuota impor pangan dan penetapan harga acuan untuk pangan strategis.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 2 (Skor Pola Pangan Harapan)

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencakupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa. Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu suatu pangan penduduk berdasarkan skor pangan. Semakin tinggi skor pangan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) telah disepakati pada tingkat nasional berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) X tahun 2012 sebagai acuan dalam pembangunan pangan dan gizi. Angka Kecukupan Energi (AKE) di tingkat konsumsi sebesar 2.150 Kkal/kap/hari, dan 2.200 Kkal/kap/hari di tingkat ketersediaan. Sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) di tingkat konsumsi adalah sebesar 52 gram/kap/hari, dan 57 gram/kap/hari di tingkat ketersediaan (Balitwati, 2015).

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa skor PPH selama tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, namun demikian pada tahun 2018 terjadi peningkatan skor PPH dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan skor PPH tahun 2018 sebesar 7,9 poin atau 9,82% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi masyarakat Provinsi DKI Jakarta sudah lebih baik dan beragam dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Skor PPH di atas dihitung dengan menggunakan AKE 2015 kkal/kap/hari.

Tabel 3.5. Perkembangan skor PPH DKI Jakarta Tahun 2013-2018

No	Skor PPH	Tahun						Skor pph ideal
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	PPH Provinsi DKI Jakarta dihitung berdasarkan AKE 2015 kkal/kapita/tahun	81,5	85,1	80,7	80,5	80,4	88,3	100

Sumber : Badan Ketahanan Pangan (2019)

Tabel 3.6. Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Kelompok/Jenis Pangan	Total Wilayah			
	Kandungan Gizi		Berat Pangan	
	Energi Kkal/Hari	Protein Gram/Hari	Gram Per Hari	Kilogram Per Tahun
1. Padi-Padian				
Beras	910,9	21,8	260,0	94,9
Jagung	2,7	0,1	2,1	0,8
Terigu	387,5	8,3	60,5	22,1
Subtotal Padi-padian	1.301,1	30,1	322,6	117,8
2. Umbi-umbian				
Singkong	25,4	0,2	21,1	7,7
Ubi Jalar	6,1	0,1	4,7	1,7
Kentang	6,3	0,2	12,1	4,4
Sagu	0,6	0,0	0,2	0,1
Umbi Lainnya	0,4	0,0	0,4	0,1
Subtotal Umbi-umbian	38,8	0,5	38,4	14,0
3. Pangan Hewani				
Daging Ruminansia	65,8	5,0	21,1	7,7
Daging Unggas	94,9	6,9	31,1	11,3
Telur	34,0	2,7	24,6	9,0
Susu	70,8	2,6	17,4	6,4
Ikan	80,9	12,7	65,9	24,1
Subtotal Pangan Hewani	346,5	29,9	160,2	58,5
4. Minyak dan Lemak				
Minyak Kelapa	21,6	0,0	2,5	0,9
Minyak Lainnya	215,0	-	23,8	8,7
Margarin	8,7	0,0	1,1	0,4
Subtotal Minyak dan Lemak	245,3	0,0	27,4	10,0
5. Buah/Biji Berminyak				
Kelapa	4,6	0,0	0,9	0,3
Kemiri	3,2	0,1	0,5	0,2
Subtotal Buah/Biji Berminyak	7,8	0,1	1,4	0,5
6. Kacang-kacangan				
Kacang Kedelai	54,8	5,5	30,8	11,2
Kacang Tanah	3,3	0,2	0,7	0,3
Kacang Hijau	5,0	0,4	2,8	1,0
Kacang lain	0,7	0,0	0,2	0,1
Subtotal Kacang-kacangan	63,9	6,2	34,6	12,6
7. Gula				
Gula Pasir	54,8	0,0	14,8	5,4
Gula Merah	3,2	0,0	0,9	0,3
Subtotal Gula	58,1	0,1	15,6	5,7

8. Sayur dan Buah				
Sayur	63,3	3,2	150,7	55,0
Buah	48,0	0,6	103,7	37,9
Subtotal Sayur dan Buah	111,3	3,8	254,4	92,9
9. Lain-lain				
Minuman	51,0	1,3	129,8	47,4
Bumbu	7,4	0,3	7,1	2,6
Subtotal Lain-lain	58,3	1,6	136,9	50,0

Tabel 3.6 menggambarkan situasi pola konsumsi masyarakat Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitas kelompok pangan yang konsumsi. Masyarakat Provinsi DKI masih sangat tergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat lain yang digemari masyarakat adalah terigu. Oleh karena jumlah penggunaan beras dan terigu mendominasi pola makan masyarakat maka sumber proteinnya juga banyak disumbang oleh kedua komoditas ini. Sumber protein lain yang turut menyumbang adalah ikan, daging unggas dan telur.

Tabel 3.7 menyajikan penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Dari tabel tersebut terlihat bahwa skor PPH Provinsi DKI tahun 2018 belum mencapai skor PPH ideal/maksimal yaitu sebesar 88,3. Hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Provinsi DKI Jakarta belum beragam. Jika ditelaah dari masing-masing kelompok pangan dan membandingkan antara skore aktual dengan skore maksimal PPH, maka kelompok pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak yang memiliki nilai skor aktual yang lebih besar dari skore maksimal, ini berarti bahwa kelompok pangan tersebut sudah memenuhi standar PPH. Namun demikian kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah-buahan masih belum mencapai skor standar. Oleh karena itu untuk mencapai PPH yang mendekati ideal perlu terus dipacu Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal, Gerakan Makan Buah dan Sayuran atau Gerakan One Day No Rice.

Tabel 3.7. Penghitungan PPH Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan g/kap/hr	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kap	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	322,6	1.301	58,3	60,5	0,5	29,2	30,3	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	38,4	39	1,7	1,8	0,5	0,9	0,9	2,5	0,9
3	Pangan Hewani	160,2	346	15,5	16,1	2,0	31,1	32,2	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	27,4	245	11,0	11,4	0,5	5,5	5,7	5,0	5,0

5	Buah/Biji Berminyak	1,4	8	0,3	0,4	0,5	0,2	0,2	1,0	0,2
6	Kacang-kacangan	34,6	64	2,9	3,0	2,0	5,7	5,9	10,0	5,9
7	Gula	15,6	58	2,6	2,7	0,5	1,3	1,4	2,5	1,4
8	Sayur dan Buah	254,4	111	5,0	5,2	5,0	24,9	25,9	30,0	25,9
9	Lain-lain	136,9	58	2,6	2,7	25,0	65,4	67,8	-	-
	Total		2.231	100,0	103,8		164,1	170,3	100,0	88,3

3.3. Realisasi Anggaran

Secara umum, realisasi anggaran total APBD Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 mencapai Rp.664.714.774.359,- (90,64%) dari anggaran Rp. 733.378.640.602,- penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 199.170.733.374,- (95,36%) dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 208.867.960.000,- dan penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 465.544.040.985,- (88,76%) dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 524.510.680.602,-.

Realisasi belanja langsung per program pada APBD Tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.8

Tabel 3.8 Realisasi anggaran belanja langsung per program

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	67.621.635.040	62.107.958.762	91,85
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan	78.230.661.976	68.886.771.626	88,06
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan	2.652.182.207	2.228.873.271	84,04
4	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	152.748.954.733	134.264.785.287	87,90
5	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	15.316.671.376	13.501.538.499	88,15

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan	23.027.936.936	21.216.399.378	92,13
7	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan	2.605.472.253	2.257.635.704	86,65
8	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	162.976.758.528	144.605.080.028	88,73
9	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian	19.037.765.898	16.188.405.776	85,03
10	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian	292.641.685	286.592.654	97,93
		524.510.680.632	465.544.040.985	88,76

Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 sesuai dengan dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja secara ringkas disajikan pada Lampiran

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2019 merupakan Tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 2 (dua) sasaran program dengan 2 indikator kinerja, semua indikator sudah mencapai target dengan kriteria capaian sangat baik.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia (SDM), anggaran dan sarana prasarana.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan permasalahan dan alternatif solusi sebagaimana diuraikan pada Bab III serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Realisasi Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Capaian	Realisasi	Interpretasi
				Tahun 2019	Tahun 2019	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	100	100	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya	%	95	99,17	Sangat tinggi
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82	88,3	Sangat tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	Sangat tinggi
5	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	Sangat tinggi
6	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	4.412	2.258	Tinggi
7	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan tangkap	ton	150.552	103.305,87*	Sedang
8	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Hias	Ekor	20.777.303	19.067.214	Sangat tinggi
9	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	79.594.751	124.288.893	Tinggi
10	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Ton	5.959	59.208	Sangat tinggi
11	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	37	49,6	Sangat tinggi
12	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	Sangat tinggi
13	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	Sangat tinggi

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Capaian	Realisasi	Interpretasi
				Tahun 2019	Tahun 2019	
	perikanan					
14	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pelangaran	78	62	Sangat tinggi
15	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	Ha.	142	143,2	Sangat tinggi
16	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi benih padi	Ton	46	45	Sangat tinggi
17	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan	kasus	6	0	Sangat tinggi
18	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi Tanaman produktif	Bibit	36.700	40.000	Sangat tinggi
19	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	ton	33.063	26.526,82	Tinggi
20	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian	ton	109	80*	Sedang
21	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah lokasi Agrowisata yang dikembangkan	Lokasi	8	8	Sangat tinggi
22	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kasus pelanggaran bidang pertanian	kasus	8	9	Tinggi
23	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi susu	liter	5.196.379	5.199.919	Sangat tinggi

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Capaian	Realisasi	Interpretasi
				Tahun 2019	Tahun 2019	
24	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi daging	kg	31.847.633	33.830.751	Sangat tinggi
25	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan	ton	11.000	11.225	Sangat tinggi
26	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan anthrax)	kasus	11	0	Sangat tinggi
27	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	ekor	9.000	12.549	Sangat tinggi
28	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah omzet pemasaran bunga dan tanaman hias	rupiah	102.000.000.000	254.893.364.267	Sangat tinggi
29	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	Sangat tinggi
30	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	Sangat tinggi

Lampiran II

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

